

# **PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI AKRUAL BASIS TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS KEUANGAN ACEH**

## **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan  
Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi

**Oleh**

**HADI SURYALIS**  
NPM: 1115020185



**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH  
BANDA ACEH  
2017**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran *Allah SWT* atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hinayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi dalam bentuk dan isi yang masih sangat sederhana ini dengan judul **PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI AKRUAL BASIS TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS KEUANGAN ACEH**

Skripsi tersebut disusun sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh Gelar Pasca Sarjana pada Fakultas Ekonomi Fakultas Serambi Mekkah. Semoga Skripsi ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembaca baik dalam bidang administrasi pendidikan, Akademisi, Pemerintah serta pihak-pihak lain yang membutuhkannya.

Namun Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyelesaian Skripsi ini tidak luput dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari semua pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Yang Mulia Ayahanda Alimuddin dan ibunda tercinta Mardiana atas segala doa, semangat, ridho, kasih sayang yang selalu tercurah.
2. Bapak Saiful Amri, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh.
3. Bapak Zainuddin, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh yang merangkap Sebagai Pembimbing I.
4. Bapak Nasir Ibrahim SE, M.Si selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing sejak dari pertama hingga selesai
5. Pegawai Kantor Dinas Keuangan Aceh yang telah berkenan r

6. Buat sahabat-sahabatku angkatan 2011 yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materiil.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, terutama kepada penulis sendiri. Namun penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam penyajian maupun dalam pembahasannya, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini, semoga Allah SWT akan membalasNya dikemudian hari. *Amin ya Rabbal A'lamin.*

Banda Aceh, September 2017  
Penulis

**Hadi Suryalis**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	 <b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
 <b>BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....</b>	 <b>8</b>
2.1 Akuntabilitas Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah .....	8
2.1.1 Manfaat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Peme- rintah .....	10
2.1.2 Indikator Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .....	12
2.2 Sistem Akuntansi Berbasis Akrua.....	14
2.2.1 Manfaat Akuntansi Berbasis Akrua .....	15
2.2.2 Indikator Akuntansi Berbasis Akrua.....	18
2.2.3 Perbedaan SAP Basis Akrua dan SAP Basis Kas .....	20
2.2.4 Penerapan Akuntansi Akrua Basis .....	24
2.3. Penelitian Sebelumnya .....	26
2.4. Kerangka Pemikiran .....	30
2.5. Hipotesis.....	31
 <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	 <b>32</b>
3.1. Lokasi dan Objek Penelitian .....	32
3.2. Populasi dan Sampel.....	32
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.4. Skala Pengukuran .....	33
3.5. Definisi Operasional Variabel.....	34
3.6. Teknik Analisis Data .....	35
3.7. Pengujian Reliabilitas dan Validitas.....	36
3.8. Pengujian Hipotesis .....	39
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	 <b>40</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	40
4.1.1 Karakteristik Responden .....	40
4.1.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas .....	42
4.1.2.1 Hasil Uji Validitas.....	
4.1.2.2 Uji Reliabilitas .....	

4.1.3 Deskriptif Variabel Penelitian .....	44
4.1.3.1 Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Keuangan Aceh .....	44
4.1.3.2 Variabel Penerapan Akuntansi Akrual Basis Pada Dinas Keuangan Aceh .....	46
4.1.3.3 Deskriptif Statistik .....	47
4.2 Regresi Linier Sederhana .....	48
4.2.1 Koefisien Korelasi dan Diterminasi .....	49
4.2.1 Pengujian Hipotesis .....	50
4.3 Pembahasan .....	50
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>52</b>
5.1 Kesimpulan .....	52
5.2 Saran-saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Sebelumnya .....	28
Tabel 3.1 Populasi dan Sampal .....	33
Tabel 3.2 Skala Pengukuran.....	34
Tabel 3.3 Definisi dan Operasionalisasi Variabel .....	34
Tabel 4.1 Karakteristik Responden .....	40
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas .....	42
Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas.....	43
Tabel 4.4 Gambaran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Keuangan Aceh .....	44
Tabel 4.5 Gambaran Penerapan Akuntansi Akrual Basis Pada Dinas Keu- angan Aceh.....	46
Tabel 4.7 Deskripsi Data Penelitian.....	47
Tabel 4.8 Hasil Analisis Regresi Linier .....	48
Tabel 4.8 Hasil Analisis Korelasi dan Diterminasi.....	50

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	30

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran 1. Kuesioner .....	55
Lampiran 2. Data Mentah Penelitian.....	57
Lampiran 3. Tabel Frekwensi .....	58
Lampiran 4. Hasil Uji Reliability .....	61
Lampiran 5. Hasil Uji Validitas .....	63
Lampiran 6. Hasil Uji Regresi Linier Berganda .....	65



## ABSTRAK

Penelitian ini merupakan studi empiris yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntansi akrual basis terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Keuangan Aceh. Populasi penelitian seluruh pegawai pada Dinas Keuangan Aceh yang berjumlah sebanyak 123 pegawai. Karena jumlah populasi terjangkau dan mencukupi maka seluruh populasi dijadikan sebagai sampel. Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan lembar pertanyaan (kuesioner) tertutup yang telah dipersiapkan kepada responden. Data primer dianalisis dengan menggunakan regresi linier sederhana. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan akuntansi akrual basis berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Keuangan Aceh. Berdasarkan hasil analisis korelasi dapat dijelaskan bahwa terdapat hubungan positif namun relatif lemah antara penerapan akuntansi akrual basis dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Keuangan Aceh. Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi dapat dijelaskan bahwa kemampuan penerapan akuntansi akrual basis dalam menjelaskan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Keuangan Aceh masih kurang dominan dibanding faktor lainnya, sehingga masih banyak faktor lain yang ikut mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas tersebut.

Kata kunci: *Akuntansi Akrual Basis, Akuntabilitas Kinerja Instansi.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perbaikan sistem birokrasi dan manajemen pemerintahan yang telah berlangsung di Indonesia sejak satu dasawarsa yang lalu telah berdampak ke berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu aspek pembaharuan yang paling konservatif adalah aspek pengelolaan keuangan. Pada aspek ini isu yang mencuat adalah adanya tuntutan terhadap sistem pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah yaitu pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah yaitu masyarakat/DPRD yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009: 20). Kegiatan ini kemudian diwujudkan dalam bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Inpres no 7 tahun 1999 dalam Badruzaman dan Chairunnisa, 2011). Instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah sebagai pengguna anggaran publik harus dapat mempertanggungjawabkan

segala bentuk aktivitasnya kepada masyarakat dalam bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dinas Keuangan Aceh merupakan bagian dari subsistem pemerintahan daerah Aceh yang melaksanakan tugas-tugas pemerintah dalam bidang pengelolaan keuangan. Dinas Keuangan Aceh yang membawahi 5 (lima) Bidang Kerja menjadi perangkat penting dari organisasi pemerintah daerah untuk menangani urusan-urusan pemerintahan dalam bentuk program kerja meningkatkan kualitas pengelolaan sistem manajemen keuangan daerah, meningkatkan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan daerah, meningkatkan monitoring/pengawasan preventif manajemen keuangan daerah kab/kota, meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur pengelola keuangan daerah sesuai dengan standar pelayanan. Seluruh kegiatan ini dilaksanakan melalui perencanaan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang harus dipertanggungjawabkan secara berkelanjutan.

Konsep akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan Dinas Keuangan Aceh saat ini sebenarnya bukanlah merupakan hal yang baru. Karena jauh sebelum diberlakukannya *new publik management* di era reformasi, Dinas ini telah melaksanakan pertanggungjawaban atas seluruh kinerja yang telah dilakukannya kepada pemerintah. Hanya saja sistem akuntabilitas yang diterapkan pemerintah saat itu masih kurang terukur dan tidak melibatkan pada berbagai aspek manfaat, dampak dan benefit. Dengan dukungan peraturan-peraturan pemerintah yang berhubungan langsung dengan keharusan penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah saat

ini membuat akuntabilitas kinerja instansi menjadi isu penting yang menjadi indikasi dari keberhasilan pemerintah termasuk Dinas Keuangan Aceh.

Hampir seluruh instansi dan lembaga-lembaga pemerintah termasuk Dinas Keuangan Aceh menekankan konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan dalam bentuk laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Konsep akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Keuangan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Namun substansinya konsep akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Keuangan menggambarkan kemampuan Dinas Keuangan Aceh dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk kepentingan masyarakat melalui pencapaian program kerja yang telah dirumuskan secara efektif.

Namun masalah akuntabilitas yang dihadapi saat ini oleh Dinas Keuangan Aceh masih berkisar pada ketidak mampuan merencanakan kegiatan, kelemahan ukuran kinerja, pemanfaatan dan pengelolaan informasi kinerja yang tidak optimal, dan evaluasi kinerja internal yang tidak berjalan secara efektif. Banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Keuangan Aceh termasuk di antaranya penerapan sistem akuntansi pemerintah yang sering berubah-ubah. Penerapan akuntansi basis akrual berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Santoso, 2008; Sukmana dan Lia, 2009; Ardiansyah, 2015).

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan semakin baik ketika pertanggungjawaban pengelolaan keuangan tidak hanya terbatas pada sumber daya kas masuk (*cash inflows*) dan kas keluar (*cash outflows*), tetapi juga terhadap asset selain kas (*non cash asset*) dan kewajiban (*liabilities*). Dengan akuntansi akrual, entitas perlu menentukan secara jelas kinerja yang ingin dicapai dan biaya keseluruhan (*full cost*) dari pelaksanaan berbagai program kerja yang dilakukan. Informasi yang lebih jelas dan akurat yang dihasilkan melalui akuntansi akrual akan menentukan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Basis akrual yang diterapkan Dinas Keuangan Aceh saat ini ternyata dapat menunjukkan bagaimana instansi ini dapat membiayai kegiatannya dan memenuhi kebutuhan kasnya. Basis akrual memungkinkan pembaca laporan keuangan mengevaluasi kemampuan Dinas Keuangan Aceh saat ini untuk membiayai aktivitas-aktivitasnya dan untuk memenuhi kewajiban dan komitmen-komitmennya. Akuntansi berbasis akrual menunjukkan posisi keuangan/kekayaan pemerintah dan perubahan atas posisi keuangan tersebut.

Basis akrual yang diterapkan Dinas Keuangan Aceh di sisi lain juga dapat memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan mengelola sumber daya yang dimiliki. Berguna dalam melakukan evaluasi atas kinerja pemerintah melalui *service cost*, efisiensi, dan pencapaian kinerja. Kondisi inilah yang mendasari bahwa penerapan akuntansi Basis akrual akan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Keuangan Aceh.

Akuntansi berbasis akrual merupakan sistem akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan. Fokus sistem akuntansi ini pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas (Nunuy, 2007:17). Dalam akuntansi berbasis akrual transaksi diakui pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi (bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar). Oleh karena itu, transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya.

Akuntansi kas yang telah dilaksanakan Dinas Keuangan Aceh sebelum keluarnya Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tidak dapat menyediakan informasi yang berkaitan dengan seluruh biaya (*full costs*) dari program kerja yang telah dilakukan oleh instansi karena sistem akuntansi berbasis kas yang diterapkan hanya mengakui arus kas masuk dan kas keluar. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Khusus pengeluaran melalui pemegang kas pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Dalam kasus ini, laporan keuangan tidak dapat dihasilkan karena ketiadaan data tentang aktiva dan kewajiban. Dalam akuntansi berbasis kas.

Sementara akuntansi akrual yang dilaksanakan saat ini mampu menyediakan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menghitung seluruh biaya berdasarkan pada biaya seluruh sumber daya yang digunakan (termasuk sumber daya

non kas seperti penggunaan aset tetap/fixed assets). Akuntansi berbasis akrual mampu mendukung terlaksanakannya perhitungan biaya pelayanan publik dengan lebih wajar. Nilai yang dihasilkan mencakup seluruh beban yang terjadi, tidak hanya jumlah yang telah dibayarkan. Dengan memasukkan seluruh beban, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar, akuntansi berbasis akrual dapat menyediakan pengukuran kinerja yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang (Muchsini, 2010). Dalam rangka pengukuran kinerja, informasi berbasis akrual dapat menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ekonomi yang sebenarnya. Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu sarana pendukung yang diperlukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pemerintah (KSAP, 2006).

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara komprehensif dalam bentuk skripsi dengan judul: **Pengaruh Penerapan Akuntansi Akrual Basis Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Keuangan Aceh.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah penelitian adalah “apakah penerapan akuntansi akrual basis berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Keuangan Aceh”.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya maka yang menjadi tujuan dari penelitian adalah “untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntansi akrual basis terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Keuangan Aceh”.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian sebelumnya, maka manfaat dalam penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat Praktis**

- Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Aceh khususnya Dinas Keuangan Aceh dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja.
- Dapat menambah wawasan berfikir penulis untuk penerapan dalam bidang pekerjaan.
- Penelitian ini dapat menjadi sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

### **2. Manfaat Teoritis**

- Dapat melengkapi temuan empiris bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu akuntansi.
- Dapat mengembangkan kemampuan penulis dalam memahami teori akuntansi akrual basis dan akuntabilitas kinerja instansi
- Dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu akuntansi.



## **BAB II**

### **TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

#### **2.1 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Maryanto (2007:1) dalam Septiriane (2012) menyatakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik

Menurut Mohamad (2006:28), akuntabilitas kinerja merupakan pertimbangan dalam membuat kebijakan dan program dan mengukur hasilnya atau hasil dibandingkan dengan standarnya. Kemudian Akuntabilitas kinerja menurut Inpres No 7 tahun 1999 (Badruzaman dan Chairunnisa, 2011) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP (2012) menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pengertian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menurut Surat Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang pedoman penyusunan dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Sedangkan Mahsun (2007:83) dalam Septiriane (2012) menjelaskan pengertian Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik.

Menurut Rasuli dan Taufeni (2014) akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta pertanggung jawaban. Berdasarkan pada pengertian yang demikian itu, maka semua Instansi Pemerintah, Badan dan Lembaga Negara di Pusat dan Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi Instansi yang bersangkutan

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP dalam Sumadya (2014) menjelaskan akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan nara nemaneku

kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

### **2.1.1 Manfaat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Manfaat laporan akuntabilitas kinerja yang diatur pada Permen PAN Nomor 29 Tahun 2010 pasal 18 adalah sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Haryono *et.al* (2008:123) menyebutkan bahwa LAKIP sebagai media akuntabilitas, sangat bermanfaat untuk tujuan-tujuan:

- a. Melakukan tindakan koreksi yang dianggap perlu untuk mengarahkan kembali kepada pencapaian hasil.
- b. Menentukan perubahan-perubahan yang diperlukan guna memperbaiki keadaan.
- c. Menguasai perkembangan kegiatan atau pelaksanaan tugas.
- d. Menilai unit-unit atau cabang kegiatan.
- e. Meningkatkan usaha-usaha agar misi dapat dilaksanakan dengan berhasil.
- f. Meningkatkan usaha-usaha dalam mencapai tujuan jangka panjang.

Mengikuti standar laporan yang ditetapkan LAN dan BPKP (2011) menyebutkan bahwa, LAKIP yang baik diharapkan dapat bermanfaat untuk:

- a. Peningkatan akuntabilitas instansi.
- b. Umpan balik baik peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- c. Peningkatan perencanaan di segala bidang, baik perencanaan program/kegiatan maupun perencanaan penggunaan sumber daya organisasi instansi.
- d. Meningkatkan kredibilitas instansi di mata instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi.

- e. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi.
- f. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- g. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

LAN dan BPKP mengatakan bahwa arti pentingnya LAKIP antara lain:

- h. Sebagai media hubungan kerja organisasi yang berisi informasi dan data yang telah diolah.
- i. Sebagai wujud tertulis pertanggungjawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi delegasi wewenang dan mandate.
- j. Sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi instansi pemerintah. LAKIP sebagai media akuntabilitas setisap instansi pemerintah, yang merupakan bentuk perwujudan kewajiban menjawab yang disampaikan kepada atasannya, atau pemberi wewenang, yang akhirnya bermuara kepada Presiden untuk selanjutnya menjadi pertanggungjawaban kepada masyarakat (public accountability) yang perlu dilakukan secara periodik dan melembaga.
- k. Sebagai media informasi, tentang sejauh mana penerapan prinsip-prinsip good governance termasuk penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar di instansi yang bersangkutan. Dalam satu fungsi manajemen adalah pelaporan, yang merupakan alat untuk evaluasi diri sendiri guna perbaikan manajemen itu sendiri

Manfaat pengukuran kinerja organisasi publik baik secara eksternal maupun internal menurut Mahsun (2007:164) adalah :

- a) Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja.
- b) Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati.
- c) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.
- d) Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi pelaksanaan yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
- e) Menjadi alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.

- f) Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- g) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- h) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.
- i) Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.
- j) Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

### 2.1.2 Indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Fokus pelaporan kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja diatur pada pasal 17 Permen PAN Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja. Laporan akuntabilitas kinerja adalah unit kerja organisasi eselon I pada kementerian atau lembaga dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) melaporkan pencapaian tujuan maupun sasaran strategis yang bersifat hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) penting; unit kerja mandiri lainnya melaporkan pencapaian sasaran strategis yang bersifat keluaran (*output*) penting dan atau keluaran (*output*) lainnya.

Suatu instansi pemerintah dapat dikatakan berhasil melaksanakan tugasnya jika telah terbukti bahwa indikator atau ukuran capaian sasaran kinerja sesuai atau searah dengan misi yang telah dirumuskan. Indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dampak (*impact*) serta proses (*process*) (Adisasmita, 2011:90).

Elemen yang terdapat dalam indikator kinerja menurut Bastian (2010:267) adalah indikator masukan (*input*), indikator proses (*process*), indikator keluaran (*output*), indikator hasil (*outcome*), indikator manfaat (*benefit*), indikator dampak (*impact*).

1. Indikator masukan (*input*). *Input* adalah semua jenis sumber daya masukan yang digunakan dalam suatu proses tentu untuk menghasilkan *output*. *Input*

tersebut dapat berupa bahan baku untuk proses, orang (tenaga, keahlian, dan keterampilan), infrastruktur seperti gedung dan peralatan, teknologi (*hardware dan software*). *Input* dibagi menjadi dua, yaitu *input* primer dan *input* sekunder. *Input* primer adalah kas, sedangkan *input* sekunder adalah bahan baku, orang, infrastruktur, dan masukan lainnya yang digunakan untuk proses menghasilkan *output*.

2. Indikator Keluaran (*output*). *Output* adalah hasil langsung dari suatu proses. Contoh *output* jumlah operasi yang dilakukan oleh dokter bedah, jumlah lulusan perguruan tinggi, jumlah kasus yang ditangani oleh polisi, jumlah undang-undang yang dibuat legislatif, jumlah gedung yang dibersihkan, panjang jalan yang di bangun, dan sebagainya.
3. Indikator Hasil (*outcome*). Konsep *outcome* lebih sulit dibandingkan *input* dan *output*. *Outcome* mengukur apa yang telah di capai. Dengan kata lain *outcome* adalah hasil yang di capai dalam suatu program atau aktifitas dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan bisa berupa target kinerja yang di harapkan, sedangkan *outcome* adalah hasil nyata yang dicapai.
4. Manfaat-dampak (*benefit-impact*)  
Manfaat dan dampak (*benefit-impact*) merupakan efek langsung dan tidak langsung atau konsekuensi yang diakibatkan dari pencapaian tujuan program. Hubungan antara *outcome*, *benefit*, dan *impact* sangat dekat dan ketigatiganya sulit untuk diukur atau diketahui dalam jangka pendek. *Outcome* merupakan dampak program atau aktivitas terhadap masyarakat. Manfaat dan dampak bisa merupakan kepuasan masyarakat. Dalam beberapa literature manfaat dan dampak ini cukup disebut dampak (*impact*).

Menurut Mahsun (2007:32) dalam pengukuran kinerja organisasi publik dengan menggunakan metode *value for money*, terdapat aspek-aspek pengukuran kinerja yang terdiri atas :

- 1) Kelompok masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
- 2) Kelompok proses (*proses*) adalah ukuran kegiatan, dari segi kecepatan, ketepatan maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
- 3) Kelompok keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*).
- 4) Kelompok hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung.

- 5) Kelompok manfaat (*benefit*) adalah sesuatu yang berkaitan dengan tujuan akhir pelaksanaan kegiatan.
- 6) Kelompok dampak (*impact*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif

## 2.2 Sistem Akuntansi Berbasis Akrua

Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Sebelum keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005, pemerintah masih menggunakan basis akuntansi kas menuju akrual dalam pengelolaan keuangan daerah/negara. Namun setelah dikeluarkannya UU Nomor 71 tersebut, pemerintah telah mulai menggunakan basis akrual.

Menurut Rasdianto (2013:10) sistem akuntansi berbasis akrual adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan. Fokus sistem akuntansi ini pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas. Dalam akuntansi akrual informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi yang lebih rinci mengenai aktiva dan kewajiban.

Menurut Nunuy (2007:17) Akuntansi berbasis akrual merupakan sistem akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan. Fokus sistem akuntansi ini pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas.

Sedangkan Halim (2007:49) menyatakan :

“Akuntansi berbasis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi (bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar). Oleh karena itu, transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya”.

Kemudian Hoesada (2010:119) menjelaskan akuntansi berbasis akrual yaitu:

“Akuntansi berbasis akrual yaitu mengakui pendapatan dan beban dalam suatu periode akuntansi pada saat pendapatan atau beban muncul, tanpa mempedulikan kapan kas dibayar atau diterima tunai, dengan tujuan membandingkan beban yang terjadi pada suatu periode dengan manfaat (*benefit*) diterima tunai dalam periode tersebut. Akuntansi akrual mengakui (1) aset yang diperoleh secara kredit (bukan tunai) pada dua sisi neraca, yaitu aset dan kewajiban, dan (2) penghasilan / pendapatan berbentuk tagihan. Sebagai konsekuensi selanjutnya, akuntansi akrual mencatat peristiwa pembayaran hutang (dengan tunai) dan penerimaan piutang (dengan tunai) sebagai peristiwa akuntansi”.

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat (Kementerian Keuangan, 2014)

### 2.2.1 Manfaat Akuntansi Akrual Basis

Basis akrual secara nyata memiliki manfaat yang besar dalam menyajikan informasi atas seluruh aktivitas yang terjadi. Menurut Widjaja (2008:11) :



(2012) memaparkan alasan penerapan basis akrual pada sektor pemerintahan, antara lain:

1. Akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup, misalnya informasi tentang hutang dan piutang untuk pengambilan keputusan ekonomi, sehingga penggunaan basis akrual sangat disarankan.
2. Hanya akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya.
3. Hanya akuntansi berbasis akrual yang dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban.
4. Hanya akuntansi berbasis akrual yang menghasilkan informasi keuangan yang komprehensif tentang pemerintah, misalnya penghapusan hutang yang tidak ada pengaruhnya di laporan berbasis kas

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2014) basis akuntansi

akrual memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah
2. Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah
3. Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Menurut International Federation of Accountants (IFAC) dalam *Public Committee Study Nomor 14 tentang Transition to the Accrual Basis of Accounting: Guidance for Governments and Government Entities (Second Edition)* dalam Mu'am (2015) terdapat beberapa kelebihan sekaligus kekurangan dalam penerapan basis akrual pada akuntansi pemerintahan. Kelebihannya antara lain:

- a) memberikan gambaran bagaimana pemerintah membiayai aktivitas-aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan pendanaannya;
- b) memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah saat ini untuk membiayai aktivitas-aktivitasnya dan untuk memenuhi segala kewajiban dan komitmen yang ada;
- c) menunjukkan posisi keuangan pemerintah dan perubahan posisi keuangannya;
- d) menyediakan ruang bagi pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelolanya;

- e) memberikan manfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas serta pencapaian hasil akhir atas penggunaan sumber daya yang dikelolanya

Kemendagri (2014) dalam Sitorus Selvina *et.al* (2015 ) menerangkan manfaat penerapan SAP berbasis akrual adalah:

1. Menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh sumber daya entitas serta penyebaran sumber daya tersebut.
2. Menilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas dari suatu entitas.
3. Pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya, atau melakukan bisnis dengan suatu entitas.

Manfaat dari penerapan akuntansi berbasis akrual menurut Kementerian Keuangan (2014) adalah:

- a. menghasilkan Laporan Keuangan yang lebih baik untuk tujuan pengambilan keputusan karena memenuhi azas "semakin baik informasi, maka semakin baik keputusan";
- b. pengalokasian sumber daya dapat diketahui lebih akurat;
- c. penilaian kinerja yang lebih akurat dalam satu tahun pelaporan karena penilaian kesehatan keuangan dikaitkan pada kinerja organisasi pemerintah;
- d. dapat menghasilkan nilai aset, kewajiban dan ekuitas yang lebih baik;
- e. pengukuran penilaian biaya suatu program/kegiatan yang lebih baik;
- f. sesuai Reformasi Manajemen Keuangan pemerintah yang diamanatkan oleh UU;
- g. sesuai dengan international best practices, termasuk untuk kebutuhan Government Finance Statistics (GFS) yang berbasis akrual; - mengakumulasi kewajiban pembayaran pensiun;
- h. menyelaraskan/meratakan belanja modal dengan akuntansi penyusutan;
- i. mewaspadaai risiko default hutang yang akan jatuh tempo bersanksi denda;
- j. memungkinkan perundingan dan penjadwalan utang yang mungkin tak mampu dibayar di masa depan yang masih jauh, tanpa tergesa-gesa;
- k. permintaan hair cut apabila posisi keuangan terlihat tidak tertolong lagi menjadi masuk akal di mata negara/lembaga donor;
- l. memberi gambaran keuangan lebih menyeluruh tentang keuangan negara dari sekadar gambaran kas;
- m. mengubah perilaku keuangan para penggunanya menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Selanjutnya dalam satu modul kajian dari *European Commission tentang Modernizing The EU Accounts* dalam Kementerian Keuangan (2014) disampaikan bahwa manfaat dari akuntansi berbasis akrual adalah :

1. Lebih efektifnya pengambilan keputusan yang telah mendapatkan informasi yang lebih komprehensif;
2. Lebih efektifnya audit karena akuntansi akrual menyediakan catatan yang jelas dan koheren;
3. Meningkatkan pengendalian politik (political control) melalui pemahaman yang lebih baik atas dampak informasi keuangan terhadap kebijakan;
4. Meminimalisasi risiko kesalahan dalam pembayaran.

## **2.2.2 Indikator Sistem Akuntansi Berbasis Akrual**

Nordiawan (2010:201) dan Bastian (2010:319) menjelaskan lebih rinci unsur dari sistem akuntansi keuangan secara umum terdiri dari (1) pencatatan, (2) pengikhtisaran dan (3) pelaporan. Adapun penjelasan sistem akuntansi keuangan sebagai berikut:

### **1) Pencatatan**

- b) Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan.
- c) Kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian atau jurnal.
- d) Memindahbukukan (posting) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar.

### **2) Pengikhtisaran**

- a) Penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi yaitu suatu daftar yang memuat nama akun atau rekening beserta

jumlah saldonya selama periode tertentu, diambil dari buku besar.

- b) Pembuatan ayat jurnal penyesuaian yaitu menyesuaikan akun-akun pada akhir periode yang belum menyajikan informasi yang paling upto date.
- c) Penyusunan kertas kerja atau neraca lajur yaitu neraca lajur merupakan alat pembantu penyusunan laporan keuangan.
- d) Pembuatan ayat jurnal penutup yaitu prosedur jurnal penutup diposting ke akun-akun bersangkutan sehingga setelah diposting, akun nominal akan nol.
- e) Pembuatan neraca saldo setelah penutupan yaitu neraca yang berisi daftar akun riil yang dibuat yang dibuat setelah dilakukan penutupan.
- f) Pembuatan ayat jurnal pembalik yaitu apabila diperlukan setelah pembuatan neraca saldo setelah penutupan, dibuat ayat jurnal pembalik.

### 3) Pelaporan

Setelah proses selesai, maka dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas pelaporan menyusun laporan keuangan.

Menurut SAP dalam Abdul (2012:24) menjelaskan kerangka konseptual berbasis akrual dari pengakuan unsur laporan keuangan, yaitu :

- a. Pengakuan pendapatan
  - 1. Pendapatan (LO) diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.
  - 2. Pendapatan (LRA) diakui pada saat kas diterima direkening kas umum negara/daerah atau oleh entitas pelaporan.
- b. Pengakuan beban dan belanja
  - 1. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.\
  - 2. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening kas negara atau daerah atau entitas pelaporan.

Kerangka konseptual dari pengukuran (nilai perolehan historis) unsur laporan keuangan, yaitu :

- a. Aset  
Dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.
- b. Kewajiban  
Dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan”.

Dalam Standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual diungkapkan bahwa basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sedangkan dalam pemerintahan penyajian laporan keuangan disajikan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas .

Dalam penerapan basis akrual nantinya, pemerintah diwajibkan untuk menyusun tujuh laporan keuangan, yakni Laporan realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perbedaan mendasar antara basis CTA dengan basis akrual terletak pada LRA dan LO.

### **2.2.3. Perbedaan SAP basis akrual dengan SAP basis kas**

Terbitnya PP. No. 71 Tahun 2010 tentang standard akuntansi pemerintahan sebagai pengganti PP No. 24 tahun 2005 menjadi awal diterangkannya akuntansi

berbasis akrual, meskipun di dalam peraturan tersebut juga masih diakomodir pilihan menerapkan basis kas menuju akrual sebagaimana yang diatur di dalam PP No. 24 tahun 2005 namun pelaksanaan akrual secara murni paling tidak sudah harus diterapkan paling lambat empat (4) tahun setelah peraturan ini diterbitkan. Atau dalam hitungan waktu dimulai tahun 2015.

Perubahan basis akuntansi dari kas menuju akrual basis membawa dampak terhadap perubahan tahapan pencatatan dan jenis laporan keuangan yang dihasilkan. Seiring dengan penerapan basis akrual untuk pelaporan keuangan, penyusunan anggaran tetap dilakukan dengan menggunakan basis kas. Hal ini berarti proses pelaporan penganggaran akan menghasilkan laporan realisasi anggaran yang tetap menggunakan basis kas, sedangkan untuk pelaporan keuangan lainnya akan menggunakan basis akrual. Perbedaan akuntansi kas dan akuntansi akrual lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Akuntansi Kas dan Akuntansi Akrual**

<b>Keterangan</b>	<b>Akuntansi Berbasis Kas</b>	<b>Akuntansi Berbasis Akrual</b>
Pelaksanaan	Relatif mudah dan Sederhana	Relatif rumit
Hubungan dengan sistem anggaran tradisional	Relatif kuat	Relatif lemah
Ruang lingkup	Hanya mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran kas	Mencatat seluruh transasaksi, baik kas maupun non-kas
Waktu pencatatan	Hanya mencatat transaksi yang terjadi dalam satu periode akuntansi	Mencatat estimasi dampak dari transaksi sekarang dan perubahan kebijakan
Audit dan control	Relatif sederhana	Relatif lebih rumit

Sumber : Paul dalam Damayanti (2012)

Perbedaan antara PP. No. 71 tahun 2010 dengan PP No. 24 tahun 2005 juga terdapat pada komponen laporan keuangan. Dalam PP No. 24 tahun 2005 disebutkan terdapat empat (4) jenis laporan keuangan yaitu: 1. Neraca: 2: laporan arus kas: 3. Laporan realisasi anggaran: 4 catatan atas laporan keuangan. Dalam PP. No. 71 tahun 2010 laporan keuangan yang harus disusun oleh pemerintah daerah (pemda) bertambah menjadi enam (6) jenis laporan keuangan yaitu : laporan realisasi anggaran; laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL); neraca: laporan arus kas: laporan operasional: laporan perubahan ekuitas; catatan atas laporan keuangan. Perbedaan sistem akuntansi pemerintahan sesudah dan sebelum diterapkannya akuntansi akrual dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2  
Penerapan Akuntansi Pemerintah Sebelum dan Sesudah Basik Akrual

PP. No. 24 Tahun 2005	PP. No. 71 Tahun 2010
LAPORAN PERUBAHAN SAL	LAPORAN PERUBAHAN SAL
Tidak Ada laporan tersendiri	Laporan perubahan SAL menyajikan secara komperatif dengan periode sebelumnya popos berikut: a. saldo anggaran lebih awal; b. Penggunaan Saldo anggaran lebih; c. sisa lebih / kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan : d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya ; dan e. lain-lain; f. Saldo anggaran lebih akhir.
NERACA	NERACA
Ekuitas Dana terbagi; - ekuitas dana lancar; selisih antara aset lancar dan kewajiban	Hanya Ekuitas yaitu kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal

Tabel 2.2 Lanjutan

<p>jangka pendek, termasuk sisa lebih pembiayaan anggaran/saldo anggaran lebih.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ekuitas dan investasi; mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dana set lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang</li> </ul>	<p>laporan</p> <p>Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas pendanaan, dan transitoris</p>
<p>panjang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> </ul> <p>LAPORAN ARUS KAS (LAK)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (par 15)</li> </ul>	<p>LAPORAN ARUS KAS (LAK)</p> <p>- disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum (par 15)</p>
<p>Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas.</p> <p>operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran</p> <p>LAPORAN REALISASI ANGGARAN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bersifat optional</li> <li>- disusun oleh entitas pelaporan yang menyajikan laporan berbasis akrual</li> <li>- sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos; <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pendapatan dari kegiatan</li> </ul> </li> </ul>	<p>Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi,</p> <p>LAPORAN OPERASIONAL (LO)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- merupakan laporan keuangan pokok</li> <li>- menyajikan pos-pos sebagai berikut a. pendapatan LO dari kegiatan operasional;</li> <li>b. beban dari kegiatan operasional;</li> <li>c. surplus/deficit dari kegiatan non operasional bila ada;</li> </ul>



Tabel 2.2 Lanjutan

<p>operasional;  b. beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasi ekonomi;  c. surplus atau defisit.</p>	<p>. posluarbiasa, bila ada e. surplus/defisit- LO</p> <p>LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- merupakan laporan keuangan pokok</li> <li>- sekurang-kurangnya menyajikan pos- pos; <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ekuitas awal;</li> <li>b. surplus/deficit-LO pada periode bersangkutan</li> <li>c. koreksi-koreksi yang langsung menambah / mengurangi ekuitas, misalnya; koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap</li> <li>d. ekuitas akhir.</li> </ul> </li> </ul> <p>CALK</p> <p>Perbedaan yang muncul hanya dikarenakan komponen laporan keuangan yang berbeda dengan PP lama</p>
<p>CALK</p> <p>Pada dasarnya hampir sama dengan PP baru.</p>	

Sumber: Pusdiklatwas. Bpkp.go.id, 2015

#### 2.2.4 Penerapan Akuntansi Akruwal Basis

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2016) penerapan basis akrual secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 1. Pengakuan

Sistem akuntansi berbasis akrual akan mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Akruwal basis digunakan untuk pengakuan pendapatan-LO, Beban, Aset Kewajiban dan Ekuitas.

## 2. Pencatatan

Sistem akuntansi akrual akan mengakomodasi basic akrual maupun basic kas dalam satu sistem. Sistem ini juga dimungkinkan dilakukannya dua jenis penjurnalan sekaligus baik untuk LRA maupun LO saat penerimaan kas maupun pengeluaran kas. Untuk mencegah duplikasi pencatatan akun Kas dalam sistem Akuntansi Berbasis Akrual ini, akan dikenal akun baru yang dinamakan perubahan SAL

## 3. Pelaporan

- a. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri
  - Laporan realisasi anggaran (LRA)
  - Laporan perubahan SAL (LP SAL)
- b. Laporan keuangan terdiri
  - Neraca
  - Laporan operasional (LO)
  - Laporan arus kas (LAK)
  - Laporan perubahan ekuitas (LPE)
- c. Catatan atas Laporan keuangan terdiri
  - Catatan Atau Laporan Keuangan (CaLK)

Menurut Kementerian Dalam Negeri (2014) akuntansi akrual basis secara lengkap yang disajikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 disusun berdasarkan struktur pernyataan standar akuntansi pemerintahan sebagai berikut:

1. PSAP Nomor 01 tentang penyajian laporan keuangan
2. PSAP Nomor 02 tentang penyajian laporan realisasi anggaran
3. PSAP Nomor 03 tentang penyajian laporan arus kas
4. PSAP Nomor 04 tentang catatan atas laporan keuangan
5. PSAP Nomor 05 tentang akuntansi persediaan
6. PSAP Nomor 06 tentang akuntansi investasi
7. PSAP Nomor 07 tentang akuntansi asset tetap
8. PSAP Nomor 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan
9. PSAP Nomor 09 tentang akuntansi kewajiban
10. PSAP Nomor 10 tentang koreksi kesalahan perubahan kebijakan akuntansi dan perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan
11. PSAP Nomor 11 tentang laporan keuangan konsolidasian
12. PSAP Nomor 12 tentang laporan operasional

Kementerian Dalam Negeri (2014) lebih jelas penerapan sistem akuntansi pemerintah akrual basis menurut PP 71 tahun 2010 secara garis besar terdiri dari:

1. Pengakuan akuntansi dalam akuntansi akrual meliputi  
Basis akrual untuk pengakuan pendapatan LO, beban, asset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas. Bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual maka LRA disusun berdasarkan basis akrual
2. Informasi laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal
  - Asset
  - Kewajiban
  - Ekuitas
  - Pendapatan LRA
  - Belanja
  - Transfer
  - Pembiayaan
  - Saldo anggaran lebih
  - Pendapatan-LO
  - Beban
  - Arus kas
  - Aset
3. Unsur Laporan keuangan pokok yang dibuat dalam akuntansi akrual terdiri dari
  - a. Laporan realisasi anggaran (LRA)
  - b. Laporan perubahan SAL (LP SAL)
  - c. Neraca
  - d. Laporan operasional (LO)
  - e. Laporan arus kas (LAK)
  - f. Laporan perubahan ekuitas (LPE)
  - g. Catatan Atau Laporan Keuangan (CaLK)

### 2.3 Penelitian Sebelumnya

Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. Santoso (2008)

Penelitian Santoso (2008) tentang pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian menjelaskan

bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Sukmana dan Lia (2009)

Penelitian Sukmana dan Lia (2009) tentang pengaruh pengawasan intern dan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian mengemukakan bahwa secara parsial maupun simultan pengawasan intern dan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

3. Tarigan dan Lestari (2013)

Penelitian Tarigan dan Lestari (2013) tentang pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan terutama dalam hal informasi aset.

4. Dharma (2014)

Penelitian Dharma (2014) tentang pengaruh pengawasan fungsional dan penerapan sistem akuntansi terhadap akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah Kota Pariaman. Hasil penelitian menunjukkan pengawasan fungsional berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas instansi pemerintah, dan penerapan sistem akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas instansi pemerintah.

## 5. Asfiansyah (2015)

Penelitian Asfiansyah ,(2015) tentang strategi implementasi akuntansi akrual pada pemerintah daerah (studi kasus pada pemerintah Kota Surabaya. Hasil penelitian dapat menjelaskan salah satu peran strategi implementasi akuntansi akrual adalah meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Ringkasan hasil penelitian sebelumnya serta perbedaan dan persamaan dengan penelitian sekarang dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1.**  
**Perbedaan dan Persamaan Penelitian**

No	Peneliti	Judul	Variabel	Model	Hasil	Persamaan	Perbedaan
2	Santoso (2008))	Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Variabel terikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Variabel bebas penerapan akuntansi sector publik.	Analisis jalur	penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Variabel dependent akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Variabel independen pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah	Lokasi dan objek penelitian sampel penelitian. Model analisis.
3	Sukmana dan Lia (2009)	pengaruh pengawasan intern dan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah (survei pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya)	- Variabel terikat kinerja pemerintah - Variabel bebas pengawasan intern dan pelaksanaan akuntansi.	Regresi linier berganda	- Baik parsial maupun simultan pengawasan intern dan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah	- Variabel dependent kinerja pemerintah - Variabel independen pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah - Model analisis.	- Variavel independen pengawasan intern - Lokasi dan objek penelitian - sampel penelitian.

Tabel 2.1 Lanjutan

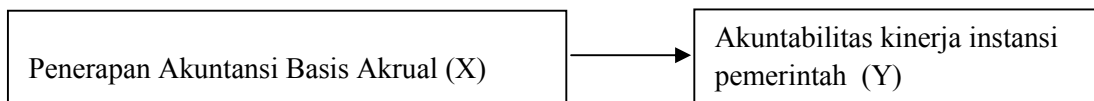
1	Tarigan dan Lastria (2013)	Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Variabel terikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan transparansi Variabel bebas penerapan akuntansi akrual.	Analisi Deskriptif	Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan terutama dalam hal informasi aset pemerintah	Variabel dependent akuntabilitas dan transparansi Variabel independen penerapan sistem akuntansi pemerintah akrual	Lokasi dan objek penelitian sampel penelitian. Model analisis.
4	Dharma (2014))	Pengaruh pengawasan fungsional dan penerapan sistem akuntansi terhadap akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah Kota Piaman	- Variabel terikat akuntabilitas kinerja instansi - Variabel bebas pengawasan fungsional dan penerapan sistem akuntansi.	- Regresi linier berganda	- Pengawasan fungsional dan penerapan system akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara parsial maupun simultan	- Variabel dependent akuntabilitas Instansi Pemerintah - Variabel independen sistem akuntansi Model analisis regresi linier	- Variabel independen pengawasan fungsional - Lokasi dan objek - Sampel penelitian.
4	Asfiansyah (2015)	tentang strategi implementasi akuntansi akrual pada pemerintah daerah (studi kasus pada pemerintah Kota Surabaya.	- Variabel terikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah - Variabel bebas penerapan akuntansi sector publik.	- Analisis deskriptif	- salah satu peran strategi implementasi akuntansi akrual adalah meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	- Variabel dependent akuntabilitas kinerja instansi pemerintah - Variabel independen pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah - Model analisis.	- Lokasi dan objek penelitian - sampel penelitian.

## 2.4 Kerangka Pemikiran

### 2.4.1 Hubungan Penerapan Akuntansi Akrua Basis Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Keuangan Aceh.

Adanya standar akrual basis dalam pelaporan keuangan akan memperbaiki kualitas dan kinerja pengelolaan keuangan pemerintahan sehingga lebih terukur, terstruktur dan dapat dibandingkan, sesuai dengan indikator yang digunakan dalam pelaksanaan *good governance* (Tarigan dan Lastria (2013). (1) Penerapan basis akrual dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas system keuangan (anggaran, akuntansi dan pelaporan) dalam sektor publik; (2) meningkatkan pengendalian fiskal, manajemen aset dan budaya sektor publik; (3) meningkatkan akuntabilitas dalam program penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah; (4) menyediakan informasi yang lebih lengkap untuk pengambilan keputusan; (5) mereformasi sistem anggaran belanja (*appropriasi*); dan (6) mencapai transparansi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah (Widjajerso, 2011 dalam Tarigan dan Lastria (2013).

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran sebelumnya maka dapat dirumuskan konsep hubungan antara variabel sebagaimana yang di tunjukkan pada Gambar 2.1.



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

## 2.5 Hipotesis

Berdasarkan uraian tujuan penelitian sebelumnya, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran dan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian adalah diduga penerapan akuntansi akrual basis berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Keuangan Aceh.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi dan Objek Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Keuangan Aceh yang berlokasi di Jalan T. Nyak Arief No 120 Kota Banda Aceh. Objek penelitian adalah penerapan akuntansi akrual basis dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selain itu juga disajikan karakteristik responden Dinas Keuangan Aceh.

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

Populasi adalah seluruh individu yang dimaksudkan untuk diteliti dan yang nantinya akan dikenai generalisasi. Generalisasi adalah suatu cara pengambilan kesimpulan terhadap kelompok individu yang lebih luas jumlahnya berdasarkan data yang diperoleh dari sekelompok individu yang sedikit jumlahnya (Winarsunu, 2012:11). Sementara sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Winarsunu, 2012:11). Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi sebagai contoh atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya (Sugiyono, 2009:85)

Dengan demikian populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas Keuangan Aceh yang berjumlah sebanyak 123 orang. Karena jumlah populasi mencukupi dan terjangkau untuk diteliti maka seluruh populasi tersebut dijadikan sebagai sampel. Populasi dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Bidang/Bagian Kerja	Populasi
1	Sekretariat	36
2	Bidang Anggaran Daerah	16
3	Bidang Pembendaharaan	33
4	Bidang Akuntansi	19
5	Bidang Pembinaan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota	21
	Jumlah	123

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data mengenai akuntansi akrual basis dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan Kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner adalah tertutup yaitu berbentuk pilihan yang telah disediakan. Kuesioner terdiri dari 3(tiga) pertanyaan tentang karakteristik responden, 6 (enam) pertanyaan tentang akuntabilitas kinerja instansi dan 4 (empat) pertanyaan tentang penerapan akuntansi akrual basis.

### 3.4 Skala Pengukuran

Untuk mengubah data-data kualitatif yang diperoleh dari kuesioner ke bentuk dan kuantitatif maka digunakan skala ukur yaitu skala Likert. Kategori pertanyaan yang dirancang dalam kuesioner diberi nilai skor 1-5. Kategori skala interval menurut Arikunto (2009:66) dapat dilihat pada Tabel 3.2.

**Tabel 3.2**  
**Skala Pengukuran**

No	Pilihan Jawaban	Skor
1	Sangat setuju	5
2	Setuju	4
3	Kurang setuju	3
4	Tidak setuju	2
5	Sangat tidak setuju	1

### 3.5. Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 kategori yaitu variabel independen yang terdiri dari Penerapan akuntansi akrual basis serta variabel dependen yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah . Variabel-variabel tersebut dijelaskan pada Tabel 3.3

**Tabel 3.3**  
**Definisi dan Operasionalisasi Variabel**

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Ukuran	Skala	Item Pertanyaan
<b>Dependen</b>						
1	Akuntabilitas Kinerja Instansi (Y)	perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodic (BPKP, 2012).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masukan</li> <li>- Proses</li> <li>- Keluaran</li> <li>- Manfaat</li> <li>- Hasil</li> <li>- Dampak</li> </ul>	1-5	Interval	B1-B6

Lanjutan Tabel 3.3

Independen						
2	Penerapan Akuntansi Akrua basis (X)	dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi (bukan hanya pada saat kas atau setra kas diterima atau dibayar). Oleh karena itu, transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya (Halim, 2007:49).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengakuan pendapatan</li> <li>- Pengakuan beban dan belanja</li> <li>- Pengukuran aset</li> <li>- Pengukuran kewajiban</li> </ul>	1-5	Interval	C1-C4

### 3.6. Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntansi akrual basis berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Keuangan Aceh digunakan analisis regresi adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X + \epsilon$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

X = Penerapan akuntansi akrual basis

$\beta$  = Parameter Regresi

$\alpha$  = Konstanta

$\epsilon$  = Error Term

### 3.7 Pengujian Validitas dan Reabilitas

#### 3.7.1 Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud (Arikunto, 2010:211). Penelitian ini menggunakan uji validitas isi dan validitas empiris. Validitas isi berkenaan dengan kesanggupan instrumen mengukur isi yang harus diukur. Artinya, alat ukur tersebut mampu mengungkap isi suatu konsep atau variabel yang hendak diukur. Misalnya tes kreativitas belajar bidang studi matematika, harus bisa mengungkap isi bidang studi tersebut.

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik yaitu dengan menggunakan uji *Pearson Product-Moment Coefficient of Correlation* dengan bantuan program SPSS, dengan tingkat signifikansi di bawah 5%. Sedangkan jika dilakukan secara manual maka nilai korelasi yang diperbolehkan harus dibandingkan dengan nilai kritis korelasi *Product Moment* dimana hasilnya menunjukkan bahwa item pertanyaan mempunyai korelasi di atas 5% atau dalam bahasa statistik terdapat konsisten internal (*internal consistency*) yang berarti item-item pertanyaan tersebut dapat mengukur aspek yang sama. Dengan kata lain, apabila  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka item pertanyaan tersebut dinyatakan valid.

### 3.7.2 Pengujian Reliabilitas

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. Maka pengertian reliabilitas instrumen, berhubungan dengan masalah ketetapan hasil tes (Arikunto, 2010:86). Ada juga yang mengatakan reliabilitas itu erat kaitannya dengan keajegan. Suatu instrumen memiliki tingkat reliabilitas yang memadai, bila instrumen tersebut digunakan mengukur aspek yang diukur beberapa kali hasilnya sama atau relatif sama. Semakin reliabel suatu tes maka semakin yakin kita dapat menyatakan dalam hasil suatu tes mempunyai hasil yang sama ketika dilakukan tes kembali (Sukardi, 2007:127). Pengujian reliabilitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik yaitu dengan menggunakan nilai *Cronbach Alpha*. Menurut Malhotra (2005) suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai di atas 0,6.

## 3.8 Uji Asumsi Klasik

### 3.8.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas digunakan untuk mengetahui apakah distribusi data penelitian masing-masing variabel telah menyebar secara normal atau tidak, hal ini dapat dilakukan dengan melihat sebaran *standarized* pada kurva *P-P* plots dan Histogram, bila *standarized residual* berada pada kisaran garis normal maka data mempunyai distribusi normal (Ghozali, 2011:101).

### 3.8.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2011:105). Untuk menguji adanya multikolonieritas dapat dilakukan dengan menganalisis korelasi antar variabel dan perhitungan nilai toleransi serta VIF (*Variance Inflation Factor*). Multikolonieritas terjadi jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel bebas yang nilainya lebih dari 95%. Nilai VIF lebih besar dari 10, apabila VIF kurang dari 10 dapat dikatakan bahwa variabel bebas yang digunakan dalam model adalah dapat dipercaya dan objektif.

### 3.8.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2011:139). Salah satu cara yang digunakan dalam mendeteksi ada tidaknya

heteroskedastisitas adalah dengan cara menggunakan uji *Glejser* yaitu dengan meregres nilai *absolute residual* terhadap variabel bebas.

### 3.9. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan secara simultan dan secara parsial dengan menggunakan nilai koefisien regresi linier berganda. Pengujian hipotesis dilakukan secara parsial sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Ho:  $\beta=0$ ; Penerapan akuntansi akrual basis tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Keuangan Aceh.

Ho:  $\beta\neq 0$ ; Penerapan akuntansi akrual basis berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Keuangan Aceh.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita Rahardjo (2011) **Manajemen Keuangan Daerah**, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Nunuy Afiah Nur (2009) **Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Keuangan Pemerintah Daerah**. Jakarta: Kencana
- Arikunto (2009) **Prosedur Penelitian**. Jakarta: Reneka Cipta.
- Bastian, Indra (2010) **Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar**. Jakarta: Erlangga.
- Badruzaman, Jajang dan Chairunnisa, Irna (2011) Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap Penerapan Good Governance. **Jurnal Akuntansi dan Bisnis AUDI**.
- BPKP (2011) **Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Modul Pembentukan Auditor Ahli**, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, Jakarta.
- Ghozali, Imam (2011) **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 19**. Semarang: BP Universitas Diponogoro.
- Halim, Abdul dan Theresia (2007) **Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah**. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Halim, Abdul (2007) **Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah**. Jakarta: Salemba Empat.
- Hoesada, Jan. 2010. *Accrual Budgeting and Accrual Accounting pada Pemerintahan NKRI*. Jurnal Akuntansi/Tahun XIV, No. 01, Januari 2010: 113-124
- Halim, Abdul dan Theresia (2007) **Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah**. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (2016) **Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah**, Jakarta
- Kementerian Keuangan (2014) **Gambaran Umum Akuntansi Berbasis Akrual**, Modul Pelatihan Kementerian Keuangan, Jakarta
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2014) **Gambaran Umum Akuntansi Berbasis Akrual, Modul Program Percepatan Akuntabilitas Pemerintah Pusat**, Jakarta

- Kementerian Dalam Negeri (2014) **Konsep Siklus Akuntansi di Pemerintahan Daerah**, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Jakarta
- Muchsini Binti (2010) Pengaruh Adopsi Akuntansi Berbasis Akrua Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Se Jawa – Bali, **Tesis** Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Mu'am Ahmad (2015) Basis Akrua dalam Akuntansi Pemerintah di Indonesia **Jurnal Lingkar Widyaishwara, Edisi 2 No. 1**, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
- Nordiawan Deddi (2010) **Akuntansi Sektor Publik**. Jakarta: Salemba Empat.
- Rasdianto Erlina (2013) **Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua**. Medan: Brama Ardian
- Rasuli Susi Heptariani Z, M. dan Taufeni Taufik (2014) Pengaruh Kejelasan Sasaran, Budaya Organisasi, dan Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja **Jurnal Sorot Vol 8 No 1** Lembaga Penelitian Universitas Riau
- Republik Indonesia, **Undang- Undang No. 71/2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan**
- Sari Dita Puspita dan Hendrawan Santosa Putra (2012) Menelisik Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. **JEAM Vol XI No. 2** Fakultas Ekonomi Universitas Jember
- Septiriane Sherillia dan Yon Nusal (2012) Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Survey Pada DPRD Kota Bandung) **Jurnal Riset Akuntansi–Volume IV No.1** Universitas Komputer Indonesia
- Sitorus Selvina *et.al* (2015 ) Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Berdasarkan PP. NO. 71 TAHUN 2010 Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon **Jurnal EMBA Vol.3 No.1** Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado
- Sugiyono (2009). **Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif**. CV.Afabeta: Bandung
- Tarigan Erwinton Putra Antonius dan Lastria Nurtanzila (2013) Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi

Pengelolaan Keuangan Daerah Jurnal Kebijakan & Administrasi  
Publik JKAP Vol 17 No 1 Pascasarjana MKP FISIPOL UGM

## KUESIONER

Kepada Yth : Bapak/Ibu/Sdr Responden

Bersama ini saya memohon kesediaan Bapak/ Ibu untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini dibuat dalam rangka penelitian ilmiah. Hanya kesimpulan keseluruhan hasil penelitian yang akan dianalisa. Kerahasiaan informasi akan sangat dijaga. Untuk itu kami sangat mengharapkan bantuan dari seluruh Bapak/Ibu untuk memberikan informasi yang benar . Atas kerjasamanya kami sampaikan rasa terima kasih.

Nomor Sampel :

**Keterangan :** Jawablah pertanyaan anda sebenar-benarnya dengan memberi tanda (√) pada kotak yang anda anggap benar

### A. Identitas Responden

Umur : ☐21-25 ☐26-30 ☐31-35  
☐36-40 ☐41-45 ☐46-50 ☐ >50

Jenis Kelamin : ☐ Pria ☐ Wanita

Pendidikan : ☐ SLTA ☐ DIII ☐ SI ☐ S2 ☐ S2

Pengalaman Kerja : ☐ <5 tahun ☐ 6-10 Tahun ☐ 11-15 Tahun  
☐ 16-20 Tahun ☐ >20 tahun

### B. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

	Sgt Tdk Setuju	Tidak Setuju	Krg Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1. Bidang/bagian kerja dapat merencanakan kebutuhan anggaran secara mencukupi tanpa menimbulkan pemborosan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Bidang/bagian kerja dapat menggunakan realisasi anggaran secara bertanggungjawab.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Tugas pokok Bidang/Bagian kerja yang dibiayai oleh anggaran dapat mencapai misi dan visi instansi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- |   |                      |                      |                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4. Program kegiatan Bidang/bagian kerja yang dibiayai dengan anggaran dapat bermanfaat bagi kepentingan umum.   | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |                      |                      |
| 5. Pencapaian dan realisasi program kerja dan program kegiatan selalu sesuai target yang telah direncanakan.  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 6. Program kerja dan program kegiatan Bidang kerja/Bagian kerja yang dibiayai dengan anggaran dapat memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

### **C. penerapan Akuntansi Basis Akrua**

- |  |                      |                      |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Pengakuan pendapatan selalu akurat sesuai dengan terjadinya transaksi penerimaan. | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 2. Pengakuan biaya selalu akurat sesuai dengan terjadinya transaksi pengeluaran.     | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 3. Pengukuran aset lebih relevan sesuai dengan nilai sekarang.                       | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 4. Pengukuran kewajiban lebih relevan sesuai dengan batas waktu pembayaran.          | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah keadaan atau ciri-ciri Aparatur Sipil Negara yang terlibat dalam pengelolaan keuangan APBK pada Dinas Keuangan Aceh. Aparatur Sipil Negara tersebut terpilih secara sensus di seluruh Bidang Kerja dan Seksi/Sub Bagian Kerja sebanyak 123 orang. Mereka memiliki tingkat umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan masa kerja yang berbeda. Karakteristik responden dapat dilihat pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Karakteristik Responden**

No	Karakteristik		Frekuensi (n)	Persentase (%)
1	Umur	31-35 Tahun	14	11,4
		36-40 Tahun	45	36,6
		41-45 Tahun	29	23,6
		46-50 Tahun	19	15,4
		>50 Tahun	16	13,0
		Total	123	100,0
2	Kelamin	Laki-laki	103	83,7
		Perempuan	20	16,3
		Total	123	100,0
3	Pendidikan	SMA	15	12,2
		S1	85	69,1
		S2	23	18,7
		Total	123	100,0

**Lanjutan Tabel 4.1**

4	Masa Kerja	5-10 Tahun	14	11,4
		11-20 tahun	61	49,6
		>20 Tahun	48	39,0
		Total	123	100,0

Sumber :Data Primer (diolah), 2016

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dijelaskan Aparatur Sipil Negara yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Keuangan Aceh sebahagian besar atau 36,6% berumur antara 36-50 tahun. Ada 13,0% dari jumlah Aparatur Sipil Negara dengan umur lebih dari 50 tahun dan 15,6% dari jumlah Aparatur Sipil Negara dengan umur antara 46–50 tahun. Selebihnya 23,6% dan 11,4% dari jumlah Aparatur Sipil Negara dengan umur antara 41–45 tahun dan 36-40. Aparatur Sipil Negara yang terdata pada Dinas Keuangan Aceh sebahagian besar atau 83,7% berjenis kelamin laki-laki, dan selebihnya 16,3% berjenis kelamin perempuan.

Dilihat dari tingkat pendidikan, sebahagian besar atau 69,1% dari jumlah Aparatur Sipil Negara yang terdata pada Dinas Keuangan Aceh adalah mereka dengan tingkat pendidikan S1. Ada 18,7% dari jumlah Aparatur Sipil Negara dengan pendidikan S2. Selebihnya 12,2% dengan tingkat pendidikan SLTA.

Dilihat dari masa kerja, sebahagian besar atau 49,6% dari jumlah Aparatur Sipil Negara yang terdata pada Dinas Keuangan Aceh adalah mereka dengan masa kerja antara 11-20 tahun. Ada 39,0% dari jumlah Aparatur Sipil Negara dengan masa kerja lebih dari 20 tahun. Selebihnya 11,4% dari jumlah Aparatur Sipil Negara dengan masa kerja 5-10 tahun.

## 4.1.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

### 4.1.2.1 Hasil Uji Validitas

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian merupakan hasil dari seperangkat set indikator dari hasil pembagian kuesioner sehingga data yang dihasilkan tersebut perlu dilakukan uji kebenaran atau validitas. Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkorelasikan skor item tiap pertanyaan dan skor rata-rata untuk seluruh pertanyaan yaitu dengan menggunakan uji *Pearson Product-Moment Coeffisient of Corelation*. Pengukuran nilai tersebut dihitung dengan bantuan perangkat program SPSS. Nilai korelasi hasil perhitungan kemudian dibandingkan dengan nilai kritis korelasi *product moment* pada tingkat signifikansi 5%. Nilai *product moment* pada df 123 dan tingkat kesalahan 5% adalah sebesar 0,176. Hasil pengujian validitas dapat dilihat Tabel 4.2.

**Tabel 4.2.**  
**Hasil Uji Validitas**

Indikator		Koefisien Korelasi	Nilai Kritis r N = 123	Keterangan
B1	AKUNTABILITAS KINERJA	0,778	0,176	Valid
B2		0,851	0,176	Valid
B3		0,827	0,176	Valid
B4		0,760	0,176	Valid
B5		0,749	0,176	Valid
B6		0,597	0,176	Valid
C1	Penerapan akuntansi akrual basis	0,686	0,176	Valid
C2		0,702	0,176	Valid
C3		0,791	0,176	Valid
C4		0,757	0,176	

Sumber : Data Primer (diolah), 2016



Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan bahwa data yang digunakan untuk variabel penelitian yaitu variabel akuntabilitas kinerja (Y) dari nilai pertanyaan B1 sampai dengan B6, masing-masing diperoleh nilai koefisien korelasi  $>$  nilai kritis *product-moment* (Lampiran 7) pada *level of significant* 5% (0,176), sehingga semua pernyataan tersebut dapat dinyatakan valid dan signifikan. Begitu juga untuk variabel penerapan akuntansi akrual basis (X) dari nilai pertanyaan C1 sampai dengan C4 masing-masing diperoleh nilai koefisien korelasi  $>$  nilai kritis *product-moment* (Lampiran 7) pada *level of significant* 5% (0,176), sehingga semua pernyataan tersebut dapat dinyatakan valid dan signifikan. Dengan demikian kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini telah benar-benar memberikan nilai ukur yang sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

#### 4.1.2.2 Hasil Uji Reliabilitas

Penggunaan item-item pertanyaan untuk data penelitian yang akan digunakan lebih lanjut dalam penelitian ini mensyaratkan adanya suatu pengujian konsistensi melalui uji reliabilitas (kehandalan), sehingga data yang digunakan untuk analisis benar-benar dapat dipercaya. Uji kehandalan item pertanyaan pada kuesioner dilakukan dengan menggunakan uji reliabilitas internal dari nilai Alpha. Uji ini hanya dilakukan satu kali pada sekelompok responden pada masing-masing variabel. Ukuran reliabilitas dianggap handal berdasarkan pada koefisien alpha 0,60 (Malhotra, 2005:305). Jika derajat kehandalan data lebih besar dari koefisien alpha ( $\alpha$ ), maka hasil pengukuran dapat dipertimbangkan sebagai alat ukur dengan tingkat ketelitian dan konsistensi pemikiran yang baik. Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat Tabel 4.3.

**Tabel. 4.3.**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

No	Variabel	Jumlah Indikator	Nilai Alpha		Keterangan
			Hitung	Standar	
1	Akuntabilitas kinerja (Y)	B1 s/d B6	0,857	0,60	Handal
2	Penerapan akuntansi akrual basis (X)	C1 s/d C4	0,714	0,60	Handal

Sumber :Data Primer (diolah), 2016

Berdasarkan Table 4.3 menjelaskan bahwa uji reliabilitas terhadap 10 jumlah atribut pertanyaan yang digunakan dalam masing-masing variabel penelitian yaitu penerapan akuntansi akrual basis (X) dan akuntabilitas kinerja (Y) diperoleh nilai alpha masing-masing sebesar 0,857 dan 0,714. Dengan demikian ke 10 item pertanyaan yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini telah dapat terpercaya karena telah memenuhi kredibilitas *Cronbach's Alpha* dengan nilai alpha yaitu 0,857 dan 0,714 lebih besar dari 0,60.

#### 4.1.3 Gambaran Variabel Penelitian

##### 4.2.3.2. Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi

Variabel penelitian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada Tabel 4.4.

**Tabel 4.4**  
**Gambaran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**  
**Pada Dinas Keuangan Aceh**

No	Akuntabilitas Kinerja Instansi	Sgt Tdk Setuju		Tdk Setuju		Krg setuju		Setuju		Sgt Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1.	Bidang/bagian kerja dapat merencanakan kebutuhan anggaran secara mencukupi tanpa menimbulkan pemborosan.	0	0.0	1	2.2	16	35.6	21	46.7	7	15.6	3,724
2.	Bidang/bagian kerja dapat menggunakan realisasi anggaran secara bertanggungjawab.	0	0,0	2	4.4	16	35.6					

**Lanjutan Tabel 4.4**

3.	Tugas pokok Bidang/Bagian kerja yang dibiayai oleh anggaran dapat mencapai misi dan visi instansi.	0	0.0	2	4.4	17	37.8	25	55.6	1	2.2	3,707
4.	Program kegiatan Bidang/bagian kerja yang dibiayai dengan anggaran dapat bermanfaat bagi kepentingan umum.	0	0.0	1	2.1	17	45.6	23	43.2	8	13.6	3,480
5.	Pencapaian dan realisasi program kerja dan program kegiatan selalu sesuai target yang telah direncanakan.	0	0,0	2	4.4	16	31.6	23	71.1	4	8.7	3,585
6.	Program kerja dan program kegiatan Bidang kerja/Bagian kerja yang dibiayai dengan anggaran dapat memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.	0	0,0	6	19.4	19	61.3	6	19.4	6	19.4	3,146
<b>Rata-rata</b>		3,556										

Sumber : Data Primer (diolah), 2016

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dijelaskan akuntabilitas kinerja instansi pada Dinas Keuangan Aceh diperoleh nilai jawaban rata-rata 3,556. Nilai tersebut mendekati 4 (skor untuk pilihan setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pegawai yang terdata menyatakan setuju tentang pertanyaan akuntabilitas kinerja tersebut. Hanya sebahagian kecil dari jumlah pegawai yang menjawab sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju dan sangat setuju.

Bidang/bagian kerja dapat merencanakan kebutuhan anggaran secara mencukupi tanpa menimbulkan pemborosan, menjadi bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan nilai jawaban tertinggi yaitu 3,724 unit. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai indikator lainnya dan mendekati 4 (skor untuk pilihan setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pegawai yang terdata menjawab setuju tentang pertanyaan indikator akuntabilitas kinerja instansi tersebut. Walaupun ada dari mereka yang memilih alternatif pilihan jawaban kurang setuju, tidak setuju dan sangat setuju hanya sebahagian kecil.

Sementara Program kerja dan program kegiatan Bidang kerja/Bagian kerja yang dibiayai dengan anggaran dapat memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat menjadi indikator akuntabilitas kinerja instansi dengan nilai jawaban terendah yaitu 3,146 unit. Nilai tersebut mendekati 3 (skor untuk pilihan kurang setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pegawai yang terdata menyatakan kurang setuju terhadap pertanyaan indikator akuntabilitas kinerja tersebut. Hanya sebahagian kecil dari jumlah pegawai yang menjawab sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju dan sangat setuju.

#### 4.1.3.1 Variabel Penerapan Akuntansi Akrua Basis

Variabel penelitian Akuntansi Akrua Basis dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada Tabel 4.5.

**Tabel 4.5**  
**Penerapan Akuntansi Akrua Basis Pada Dinas Keuangan Aceh**

No	Penerapan Akuntansi Akrua Basis	Sgt Tdk Setuju		Tdk Setuju		Krg Setuju		Setuju		Sgt Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1.	Pengakuan pendapatan selalu akurat sesuai dengan terjadinya transaksi penerimaan.	0	0,0	6	19.4	19	61.3	6	19.4	6	19.4	3,512
2.	Pengakuan biaya selalu akurat sesuai dengan terjadinya transaksi pengeluaran.	0	0,0	0	0.0	19	61.3	12	38.7	0	0.0	3,455
3.	Pengukuran aset lebih relevan sesuai dengan nilai sekarang.	0	0,0	0	0.0	22	71.0	9	29.0	0	0.0	3,658
4.	Pengukuran kewajiban lebih relevan sesuai dengan batas waktu pembayaran.	0	0,0	0	0.0	16	51.6	15	48.4	0	0.0	3,683
<b>Rata-rata</b>												3,577

Sumber: Data Primer (diolah), 2016

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dijelaskan penerapan al

pada Dinas Keuangan Aceh diperoleh nilai jawaban rata-rata

tersebut mendekati 4 (skor untuk pilihan jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebagian besar dari jumlah pegawai yang terdata menjawab setuju untuk sejumlah pertanyaan tentang penerapan akuntansi akrual basis tersebut. Walaupun ada dari mereka yang memilih alternatif pilihan jawaban kurang setuju, tidak setuju dan sangat setuju hanya sebagian kecil.

Pengukuran kewajiban telah relevan sesuai dengan batas waktu pembayaran menjadi indikator penerapan akuntansi akrual dengan nilai jawaban tertinggi yaitu 3,683 unit. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai indikator lainnya dan mendekati 4 (skor untuk pilihan jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebagian besar dari jumlah pegawai yang terdata menjawab setuju tentang pertanyaan indikator penerapan akuntansi akrual tersebut. Walaupun ada dari mereka yang memilih alternatif pilihan jawaban kurang setuju, tidak setuju dan sangat setuju hanya sebagian kecil.

Sementara pengakuan biaya selalu akurat sesuai dengan terjadinya transaksi pengeluaran menjadi indikator penerapan akuntansi akrual basis dengan nilai jawaban terendah yaitu 3,455. Nilai tersebut lebih rendah dari nilai indikator lainnya dan mendekati 3 (skor untuk pilihan jawaban kurang setuju), yang artinya sebagian besar dari jumlah pegawai Dinas Keuangan Aceh yang terdata menjawab kurang setuju tentang indikator penerapan akuntansi akrual basis tersebut. Walaupun ada dari mereka yang memilih alternatif pilihan jawaban tidak setuju, setuju dan sangat setuju hanya sebagian kecil.

#### 4.1.3.3 Deskripsi Statistik

Deksriptif statistik variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada Tabel 4.6.

**Tabel. 4.6**  
**Deskripsi Data Penelitian**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	123	2.50	4.67	3.5564	.56464
Penerapan akuntansi akrual basis	123	2.50	4.50	3.5772	.54710
Valid N (listwise)	123				

Berdasarkan Tabel 4.6 menjelaskan data primer skala likert yang digunakan untuk pengukuran variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam penelitian ini rata-rata berkisar 3,55 unit skala likert, dengan nilai jawaban terendah 2,5 unit skala dan nilai tertinggi 4,6 unit skala. Tingkat perubahan (kenaikan dan penurunan) nilai skala tersebut rata-rata berkisar 0,564 unit. Sementara nilai skala yang digunakan untuk pengukuran variabel penerapan akuntansi akrual basis dalam penelitian ini rata-rata berkisar 3,57 unit skala, dengan nilai jawaban terendah 2,50 dan nilai jawaban tertinggi 4,50 unit skala. Tingkat perubahan (kenaikan dan penurunan) nilai skala tersebut rata-rata berkisar 0,547 unit.

#### 4.1.4 Regresi Linier Sederhana

Untuk keperluan penelitian dengan menggunakan program SPSS, hasil regresi linier berganda dapat dilihat pada Tabel 4.7

**Tabel 4.7**  
**Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,869	0,302		6,190	0,000
	Penerapan akuntansi akrual basis	0,472	0,083	0,457	5,651	0,000

Sumber: Data Primer (diolah), 2016

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dijelaskan hasil output SPSS pada tabel di atas dapat dibuat garis persamaan linier adalah sebagai berikut:

$$Y = 1,869 + 0,472 X + \varepsilon$$

#### 4.1.4.1 Koefisien Korelasi dan Determinasi

Hasil analisis regresi linier berganda melalui SPSS menghasilkan satu set nilai hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat yang biasa di kenal dengan koefisien korelasi dan determinasi. Koefisien korelasi adalah suatu fenomena yang menunjukkan hubungan antara variabel bebas baik secara parsial maupun simultan dengan variabel bebas. Dari hasil analisis ini di peroleh beberapa keputusan antara lain :

1. Korelasi positif di tandai dengan besaran koefisien korelasi dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien dengan notasi plus (+), hal ini mempunyai makna bahwa semakin tinggi perubahan variabel bebas akan semakin tinggi perubahan variabel terikat.
2. Korelasi negatif, ditandai dengan hasil perhitungan korelasi diperoleh koefisien dengan notasi min (-), hal ini mempunyai makna bahwa sem  
variabel bebas akan semakin rendah perubahan variabel terik

3. Korelasi nol, ditandai dengan hasil perhitungan korelasi diperoleh nilai koefisien dengan notasi nul (0), hal ini mempunyai makna bahwa tidak terjadi perubahan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Koefisien korelasi dalam penelitian ini adalah suatu fenomena yang menunjukkan hubungan antara variabel bebas yaitu penerapan akuntansi akrual basis dengan variabel terikat yaitu akuntabilitas kinerja . Dari hasil output SPSS dapat diketahui tingkat hubungan variabel bebas dengan variabel terikat antara lain:

**Tabel 4.7**  
**Hasil Analisis Korelasi dan Korelasi Diterminasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,457 <sup>a</sup>	0,209	0,202

Sumber: Data Primer (diolah), 2016

#### 4.1.4.2 Pengujian Hipotesis

Berdasarkan regresi linier sederhana sebelumnya maka dapat dijelaskan pengujian hipotesis yaitu sebagai berikut:

H: Nilai  $\beta = 0,472$ , berdasarkan nilai tersebut maka  $\beta \neq 0$ , sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis nul ( $H_0$ ) di tolak, dan hipotesis alternatif  $H_a$  di terima. Artinya penerapan akuntansi akrual basis berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pada Dinas Keuangan Aceh.

## 4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengujian hipotesis, maka variabel penerapan akuntansi akrual basis berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Keuangan Aceh. Nilai konstanta

instansi adalah sebesar 1,869 menjelaskan jika penerapan akun



tidak mengalami perubahan, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) pada Dinas Keuangan Aceh secara konstan adalah sebesar 1,869 unit skala likert.

Penerapan akuntansi akrual basis berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi Dinas Keuangan Aceh sebesar 0,472 unit skala likert, menjelaskan setiap meningkatnya penerapan akuntansi akrual basis 1 (satu) unit skala likert maka akan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Keuangan Aceh sebesar 0,472 unit skala likert. Dengan demikian jika penerapan akuntansi akrual basis pada Dinas Keuangan Aceh dapat ditingkatkan maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan semakin baik. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tarigan dan Lastria (2013) yang mengatakan penerapan akuntansi akrual basis berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Nilai (R) sebesar 0,457 atau 45,7% menjelaskan secara positif terdapat hubungan antara variabel penerapan akuntansi akrual basis dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Keuangan Aceh dengan keeratan hubungan 45,7%. Hubungan tersebut tergolong lemah dengan nilai koefisien kurang dari 0,50 atau 50%.

Nilai ( $R^2$ ) sebesar sebesar 0,209 atau 20,9% menjelaskan, kemampuan variabel penerapan akuntansi akrual basis dalam menjelaskan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Keuangan Aceh adalah sebesar 0, 0,209 atau 20,9%. Sementara nilai sisa sebesar 0,791 atau 79,1% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini seperti pengawasan dan pemerinksaan, sistem informasi serta faktor lainnya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akuntansi akrual basis berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Keuangan Aceh dengan nilai pengaruh sebesar 0,472 .
2. Nilai R sebesar 0,457 menjelaskan hubungan antara variabel penerapan akuntansi akrual basis dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Keuangan Aceh adalah sebesar 45,70%. Hubungan tersebut merupakan bentuk hubungan yang lemah.
3. Nilai R Square ( $R^2$ ) sebesar 0,209, artinya kemampuan kedua variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 20,9%. Sedangkan sisanya 0,791 (79,1%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model kajian penelitian ini.

#### **5.2 Kelemahan**

Penelitian ini terdapat kelemahan, dimana jumlah variabel dan sampel penelitian yang digunakan masih sangat terbatas.

#### **5.3 Saran-saran**

Berdasarkan kelemahan di atas maka dapat disarankan variabel dan jumlah sampel penelitian dari beberapa SKPD lain

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita Rahardjo (2011) **Manajemen Keuangan Daerah**, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Nunuy Afiah Nur (2009) **Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Keuangan Pemerintah Daerah**. Jakarta: Kencana
- Arikunto (2009) **Prosedur Penelitian**. Jakarta: Reneka Cipta.
- Bastian, Indra (2010) **Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar**. Jakarta: Erlangga.
- Badruzaman, Jajang dan Chairunnisa, Inna (2011) Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap Penerapan Good Governance. **Jurnal Akuntansi dan Bisnis AUDI**.
- BPKP (2011) **Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Modul Pembentukan Auditor Ahli**, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, Jakarta.
- Ghozali, Imam (2011) **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 19**. Semarang: BP Universitas Diponogoro.
- Halim, Abdul dan Theresia (2007) **Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah**. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Halim, Abdul (2007) **Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah**. Jakarta: Salemba Empat.
- Hoesada, Jan (2010) *Accrual Budgeting and Accrual Accounting* pada Pemerintahan NKRI. **Jurnal Akuntansi/Tahun XIV, No. 01**.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (2016) **Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah**, Jakarta
- Kementerian Keuangan (2014) **Gambaran Umum Akuntansi Berbasis Akrua**, Modul Pelatihan Kementerian Keuangan, Jakarta
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2014) Gambaran Umum Akuntansi Berbasis Akrua, **Modul Program Percepatan Akuntabilitas Pemerintah Pusat**, Jakarta
- Kementerian Dalam Negeri (2014) **Konsep Siklus Akuntansi di Pemerintahan Daerah**, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Jakarta

- Muchsini Binti (2010) Pengaruh Adopsi Akuntansi Berbasis Akrua Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Se Jawa – Bali, **Tesis** Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Mu'am Ahmad (2015) Basis Akrua dalam Akuntansi Pemerintah di Indonesia **Jurnal Lingkar Widya Iswara, Edisi 2 No. 1**, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
- Nordiawan Deddi (2010) **Akuntansi Sektor Publik**. Jakarta: Salemba Empat.
- Rasdianto Erlina (2013) **Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua**. Medan: Brama Ardian
- Rasuli Susi Heptariani Z, M. dan Taufeni Taufik (2014) Pengaruh Kejelasan Sasaran, Budaya Organisasi, dan Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja **Jurnal Sorot Vol 8 No 1** Lembaga Penelitian Universitas Riau
- Republik Indonesia, **Undang- Undang No. 71/2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan**
- Sari Dita Puspita dan Hendrawan Santosa Putra (2012) Menelisik Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. **JEAM Vol XI No. 2** Fakultas Ekonomi Universitas Jember
- Septiriane Sherillia dan Yon Nusal (2012) Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Survey Pada DPRD Kota Bandung) **Jurnal Riset Akuntansi–Volume IV No.1** Universitas Komputer Indonesia
- Sitorus Selvina *et.al* (2015 ) Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Berdasarkan PP. NO. 71 TAHUN 2010 Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon **Jurnal EMBA Vol.3 No.1** Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado
- Sugiyono (2009). **Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif**. CV.Afabeta: Bandung
- Tarigan Erwinton Putra Antonius dan Lastria Nurtanzila (2013) Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan **Daerah Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik JKAP Vol 17 No 1** Pascasarjana MKP FISIPOL UGM

## KUESIONER

### PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI AKRUAL BASIS TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS KEUANGAN ACEH

Kepada Yth : Bapak/Ibu/Sdr Responden

Bersama ini saya memohon kesediaan Bapak/ Ibu untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini dibuat dalam rangka penelitian ilmiah. Hanya kesimpulan keseluruhan hasil penelitian yang akan dianalisa. Kerahasiaan informasi akan sangat dijaga. Untuk itu kami sangat mengharapkan bantuan dari seluruh Bapak/Ibu untuk memberikan informasi yang benar . Atas kerjasamanya kami sampaikan rasa terima kasih.

Nomor Sampel :

Keterangan : Jawablah pertanyaan anda sebenar-benarnya dengan memberi tanda (✓) pada kotak yang anda anggap benar

#### A. Identitas Responden

Umur : ☐ 21-25 ☐ 26-30 ☐ 31-35  
☐ 36-40 ☐ 41-45 ☐ 46-50 ☐ >50

Jenis Kelamin : ☐ Pria ☐ Wanita

Pendidikan : ☐ SLTA ☐ DIII ☐ SI ☐ S2 ☐ S2

Pengalaman Kerja : ☐ <5 tahun ☐ 6-10 Tahun ☐ 11-15 Tahun  
☐ 16-20 Tahun ☐ >20 tahun

#### B. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

	Sgt Tdk Setuju	Tidak Setuju	Krg Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1. Bidang/bagian kerja dapat merencanakan kebutuhan anggaran secara mencukupi tanpa menimbulkan pemborosan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Bidang/bagian kerja dapat menggunakan realisasi anggaran secara bertanggungjawab.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Tugas pokok Bidang/Bagian kerja yang dibiayai oleh anggaran dapat mencapai misi dan visi instansi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- |   |                      |                      |                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4. Program kegiatan Bidang/bagian kerja yang dibiayai dengan anggaran dapat bermanfaat bagi kepentingan umum.   | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 5. Pencapaian dan realisasi program kerja dan program kegiatan selalu sesuai target yang telah direncanakan.  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 6. Program kerja dan program kegiatan Bidang kerja/Bagian kerja yang dibiayai dengan anggaran dapat memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

### **C. penerapan Akuntansi Basis Akrual**

- |  |                      |                      |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Pengakuan pendapatan selalu akurat sesuai dengan terjadinya transaksi penerimaan. | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 2. Pengakuan biaya selalu akurat sesuai dengan terjadinya transaksi pengeluaran.     | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 3. Pengukuran aset lebih relevan sesuai dengan nilai sekarang.                       | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 4. Pengukuran kewajiban lebih relevan sesuai dengan batas waktu pembayaran.          | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |